

Baca artikel lainnya seperti Humaniora di Kompas.id dengan memindai QR Code. Klik: [kompas.id/humaniora](https://kompas.id/humaniora)

Sekjen PDI-P Melihat Pameran



Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hastu Kristiyanto (kiri) didampingi General Manager Bentara Budaya Itham Khoiri menikmati lukisan Budi Uchus dalam pameran tunggal *Ratu Auli* di Bentara Budaya Jakarta, Senin (15/1/2024).

# Presiden: Optimalisasikan Biaya Pendidikan dan Riset

Presiden Joko Widodo kaget dengan rendahnya rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengoptimalkan pembayasan pendidikan dan riset. Optimalisasi tersebut bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan juga dari dana abadi yang dimiliki.

Presiden menekankan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. "Yang sering juga saya sampaikan yang bukan hanya mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga mau terus belajar. SDM yang kuat fisik, mental, dan mentalnya. SDM yang inovatif menghasilkan karya-karya yang berkualitas," ujarnya.

Selain itu, program tinggi memiliki peran strategis menjadi lembaga riset. Dengan jumlah akan dan tenaga peneliti yang banyak, Indonesia harus mengambil kebijakan untuk mengatasi problem itu. "Sehala lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita, tetapi apa pun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci," tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa anggaran pendidikan di APBN selama 12 tahun, dari 2009 hingga 2024, mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah alokasi Rp 1.000 triliun untuk riset dan pendidikan tinggi.

Presiden kaget dengan rendahnya rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif. "Kita harus memastikan bahwa investasi yang kita lakukan benar-benar menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global," ujarnya.

BAHASA

MARTINUS ARIYA SETA  
Dosen Universitas Sebelas Maret, Yogyakarta

## Apa Itu Liberal?

Negara-negara Barat acapkali dituding sebagai negara liberal. Istilah liberal cenderung dipahami dengan konotasi negatif karena dikaitkan dengan tindakan amoral. Mengapa konotasi negatif ini muncul? Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah acuan referensi. Yang kedua adalah bias perspektif.

Konotasi negatif muncul karena yang menjadi acuan referensi adalah norma seksualitas dan keagamaan. Di negara-negara Barat, persoalan seksualitas dan agama adalah persoalan di ranah privat. Apa yang dianggap tabu dan dilarang di Indonesia justru diperbolehkan dan dilindungi di negara-negara Barat. Norma-norma yang mengatur persoalan seksualitas dan agama, bisa dikatakan, sangat longgar.

Yang dicemoi dari kebebasan adalah kebebasan beragama dan kebebasan seksualitas. Pandangan ini memang menimbulkan pro dan kontra, tetapi inilah yang menjadi patokan dari prinsip liberalisme di Barat. Kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai kebebasan untuk memilih agama, tetapi juga kebebasan untuk tidak beragama.

Gagasan kebebasan beragama mulai berkembang di Barat sejak abad ke-18. Sementara itu, keran kebebasan seksualitas mulai dibuka di Barat sejak 1960-an. Revolusi kebudayaan 1968 merupakan salah satu tonggak dari revolusi seksualitas di Barat.

Kebebasan beragama dan kelonggaran norma seksualitas hanyalah salah satu sisi dari negara Barat. Jika yang dijadikan acuan referensi adalah persoalan penegakan hukum dan aturan sehari-hari, apakah negara Barat adalah negara liberal? Hukum dan peraturan ditegakkan dengan ketegasan. Semua diatur dengan sangat baik, mulai dari persoalan lalu lintas, kebersihan lingkungan, tata ruang, hingga aturan ketenagakerjaan. Para pelanggar akan ditindak tegas.

Dalam ranah politik, keputusan (*Stillecherit*) benar-benar diteliti. Melanggar keputusan tidak selalu berarti melanggar hukum positif. Sering terjadi, pejabat publik mengundurkan diri karena melanggar keputusan. Demokrasi tidak cukup dibagikan hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keputusan.

Jika wawasan kita diperlebar, kita harus mengakui dalam beberapa hal kita lebih liberal daripada orang-orang Barat. Ini bukan persoalan pro-Barat atau bukan. Ini persoalan *fairness*. Acuan referensi adalah sebuah perspektif yang memiliki keterbatasan. Jika keterbatasan ini tidak diadiri, akan muncul bias.

Gibah memang mengayalkan, tetapi ini rentan dengan bias perspektif. Saking awaknya bergibah, kita tidak menyadari bias perspektif. Kita menggunakan pisau analisis yang tajamnya minta ampun ketika gibah tentang orang lain atau negeri orang. Sebaliknya, pisau analisis kita sangat tumpul ketika harus melihat diri sendiri atau negeri sendiri.

Di balik tuduhan liberal, barangkali ada motif membungkam kelompok sendiri, dengan mendiskreditkan kelompok kita. Ini adalah salah satu mekanisme pemertanian identitas kelompok. Ada kecenderungan ideologi di dalam mekanisme ini. Ciri khas kecenderungan ideologi adalah overgeneralisasi dan hilangnya kemampuan objektif. Dalam bahasa yang sederhana, kita membutuhkan kejelasan orang lain untuk memajukan keuntungan diri kita.

Mengkritik adalah hal yang wajar agar kita juga tidak menjadi lalat seolah-olah negara Barat menjadi ukuran ideal untuk segala-galanya. *Fairness* juga hal yang penting agar kita tidak kehilangan kemampuan objektif. Gibah-bikabik menggunakan istilah Kita harus *fair* dalam menggunakan istilah liberal.

LANGKAN

### Diet Rendah Karbohidrat Rem Berat Badan

Diet rendah karbohidrat memiliki dampak jangka panjang yang berbeda dalam peningkatan berat badan. Riset para peneliti di Harvard TH Chan School of Public Health menunjukkan, pola makan rendah karbohidrat berisiko meningkatkan risiko diabetes tipe 2.